

PEMBANGUNAN DALAM ISLAM

Oleh

Dr. Edyson Saifullah, Lc., M.A

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah peradaban manusia, masyarakat selalu berusaha untuk mewujudkan keadilan, sebagai prasyarat untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran menggunakan berbagai pendekatan. Itulah yang menjadi tujuan dari setiap proses pembangunan yang dilakukan suatu bangsa.

Setiap aliran pemikiran atau teori mempunyai pendekatan yang berbeda sesuai dengan ideologi, konteks sosial budaya serta sejarah yang mengiringinya. Kapitalisme, misalnya merumuskan masyarakat sejahtera dalam pendekatan materialis murni. Kesejahteraan didefinisikan sebagai terpenuhinya segala kebutuhan materil manusia sesuai dengan hasil kerja optimal masing-masing orang atau kelompok. Pendekatan materialis murni biasanya menegasikan kebutuhan rohani spiritual. Sebagaimana menurut *Adam Smith* dalam karyanya *The Wealth of Nation* (1776) bahwa kesejahteraan diukur berdasarkan seberapa besar hasil barang dan jasa yang produksi dan dikonsumsi. Karenanya yang disebut dengan istilah negara maju adalah yang menikmati pendapatan tinggi, tanpa memperhatikan tingkat kehancuran nilai-nilai spiritual masyarakatnya; sedangkan negara terkebelakang adalah negara dengan pendapatan rendah.¹

¹ lihat Mannân, Muhammad A., *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermasa, 1992, h. 54, lihat juga Al-Syakîrî, Abdul Haq, *al-Tanmiya al-*

Sosialisme di sisi lain melihat masyarakat sejahtera dengan pendekatan komunal, bahwa keadilan yang dimaksud untuk mencapai kesejahteraan tersebut adalah pemerataan yang diatur oleh negara atau pemerintah pusat.

Demikianlah sistem kapitalis dengan prinsip 'kebebasan pasar' dan sosialis dengan prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai dan sistem yang sama-sama dibangun atas dasar 'materi kebendaan' yang menguasai dan menentukan arah bahwa 'pertumbuhan ekonomi' adalah tujuan utama bangsa manusia. Perbedaan antara keduanya hanya dalam hal 'sistem kepemilikan' dan 'sistem distribusi' kekayaan. Jika Kapitalis telah berumur 500 tahun, maka Sosialis hanya mampu bertahan selama 70 tahun; tapi keduanya telah gagal dalam menghadirkan kedamaian di muka bumi, bahkan kedamaian otonom para penganutnya.

Dalam proses mensejahterahkan kehidupan bangsa, di dalamnya terkait proses pengelolaan sumberdaya nasional yang secara sektoral meliputi pembangunan di bidang politik, ekonomi, industri, pertanian dan sebagainya.

Masalah pengangguran sebagai masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan. Tidak saja berkaitan dengan masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial yaitu harga diri individu.

Iqtisâdiya fi al-Minhaj al-Islâmî, Qaţar: Riâsat al-Mahâkim al-Syar'iyah wa al-Syuûn al-Dîniyah, 1408 H, h. 26

PEMBANGUNAN MENURUT ISLAM

Pembangunan menurut bahasa adalah: tumbuh, bertambah dan berkembang;² perkembangan, pertambahan; bertambah dan menjadi banyak;³ Perihal membangun, proses membangun mencapai kemajuan, perkembangan dan sebagainya;⁴ atau menumbuh-kembangkan segala sumber daya yang tersedia agar bertambah menjadi banyak.

Adapun definisi pembangunan menurut istilah ekonomi antara lain adalah: Proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus, dilakukan oleh sekelompok individu, bertujuan menciptakan perubahan mendasar, berkenaan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang terkebelakang, agar menjadi kelompok masyarakat ekonomi, sosial, ilmiah dan budaya baru; dimana seseorang bisa menikmati kehidupan lebih baik dari pada sebelumnya.⁵ Atau secara umum pembangunan adalah proses yang berlangsung secara berkelanjutan terus-menerus, dilakukan sekelompok individu, bertujuan untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan bersifat kuantitatif dan kualitatif, agar menjadikan masyarakat bisa menikmati kehidupan lebih

² Muṣṭafâ, Ibrahim wa âkhorûn, *al-Mu'jam al-Wasîf*, Istanbûl: Dâr al-Da'wah, 1989, jld. 1-2, h. 956

³ Ibn Manẓûr, Abû al-Fadhl Jamâluddîn Muḥammad bin Mukram, *Lisân al-'Arab*, Beirût: Dâr al-ṣâdir, 1985, jld. 15, h. 341

⁴ Sâlim, Syeikh Osmân bin Sheikh (ed), *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991, h.93

⁵ Halbâwî, Yûsuf wa 'Abd Kharabsyah, *Nabwu Maḥbûm Afḍhal li al-Tanmiya al-Hadîsah*, Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1989, h. 13

baik dari pada sebelumnya; dengan mengem-bangkan segala potensi dan sumberdaya yang tersedia secara maksimal.

Kalimat *ista'mara* (□□□□□□) berasal dari kata 'amara' (عمر) bermakna: permintaan atau perintah dari Allah yang bersifat mutlak agar bangsa manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan.

Sebagaimana dijelaskan *Al-Qurṭubî* dalam kitab tafsirnya, bahwa ayat tersebut mengandung arti 'perintah' bersifat mutlak dan hukumnya adalah *wajib* 'agar manusia memakmurkan kehidupan dengan melakukan pembangunan'.⁶

Kemakmuran atau kesejahteraan hidup di bumi hanya bisa diwujudkan dengan berkerja, yang menghasilkan nilai ekonomi dan sosial, sebagai kontribusi pada proses pembangunan yang bertujuan menciptakan kemakmuran.

Sedangkan pengertian pembangunan ekonomi dikaitkan dengan tujuannya: adalah pengembangan produksi dan kekayaan sumberdaya yang dimiliki masyarakat, dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi seefisien mungkin. Sehingga produk yang dihasilkan melalui pembangunan, mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan penanggulangan kemiskinan,⁷ Sebagai pembuka jalan menuju terciptanya masyarakat sejahtera.

⁶ Al-Qurṭubî, Muhammad bin Ahmad al-Anṣârî, *Al-Jâmi' Li Abkâm al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyya, 1993, Juz 33, h. 39

⁷ Lihat 'Ajwa, 'Athif, *Majbum at-Tanmiya al-Iqtisadiya wa al-fikr al-Iqtisadi al-Islami*, Jeddah: Majalah al-Iqtisâd wa al-Idârah, Jâmi'ah Malik abd al-'Azîz, vol. 17, Mei 1983 dan 'Afar, Muhammad Abd al-Mun'im, *al-Takhfîf wa al-Tanmiya fî al-Islâm*, Jeddah: Dâr al-Bayân al-'Arabî, 1985, h. 125,

Aktifitas pembangunan sebagai implementasi dari ibadah, sesuai dengan ketentuan bahwa 'setiap amal saleh adalah ibadah', bersifat produktif dan kontributif. Dengan pengertian bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh akal dan anggota tubuh manusia yang menghasilkan produk barang atau jasa, serta memiliki nilai kontribusi bersifat ekonomi bagi penambahan tingkat 'kemakmuran' termasuk dalam kategori makna *'ibâdab'*. Dan usaha dan proses pembangunan dalam pengertian Islam, harus menjamin terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi bagi setiap individu warga masyarakat; kemudian ketika ada sebagian hak dasar tersebut yang tidak terpenuhi, hal itu mengindikasikan adanya kemiskinan yang belum tertanggulangi; disebabkan perilaku 'kontraproduktif' sebagian individu dalam masyarakat, yang tidak melaksanakan fungsi 'kerja'-nya. Atau bekerja, tapi menguasai hasil melebihi porsi haknya yang tidak sesuai dengan kadar kontribusinya dalam proses pemakmuran, dengan mengambil hasil dari kontribusi orang lain. Dalam hal demikian telah terjadi masalah dalam faktor distribusi.

Definisi *pekerjaan* menurut istilah umum adalah: segala sesuatu yang berasal dari bekerja atau gerakan setiap bagian tubuh, baik dengan kemauan atau tanpa dengan kemauan; bisa berasal dari benda mati, tumbuh-tumbuhan ataupun hewan. Dan digunakan juga dalam pengertian gerak-gerik tingkah laku

dalam *Nadwâ Ishâm al-Fikri al-Islami fi al-Iqtisâd al-Ma'ashir*, h. 236-238, lihat juga Khursyid, *al-Tanmiya al-Iqtisâdiya fi Itâr Islâmî*, h. 56

manusia, seperti ‘amal ma’ruf atau perilaku kebaikan’.⁸ Mencakup segala manfa’at kegunaan dari hasil yang dilakukan manusia, dengan mendapatkan imbalan.⁹

Definisi ‘pekerjaan’ menurut istilah ekonomi Islam adalah: ‘Tenaga jasmani dan akal yang dikeluarkan oleh manusia dalam kegiatan ekonomi yang sesuai syariah, untuk mendapatkan penghasilan memenuhi kebutuhan hidup’.¹⁰ Hal tersebut sikron dengan tujuan pembangunan yakni untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia.

Dari definisi di atas, bahwa ‘pekerjaan’ baik pengertian secara syariah atau ekonomi, meliputi setiap tenaga yang dikeluarkan manusia, dengan mendapatkan upah atau harta, baik dengan tenaga jasmani seperti keahlian yang menggunakan anggota badan; atau kemampuan otak seperti mengajar; atau menggunakan kedua-duanya, yang mendatangkan manfaat bagi manusia.

MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM ISLAM

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat melalui keadilan dalam pendistribusian sumberdaya alam dan kekayaan bersama, dalam konteks ini, Islam memiliki pendekatan yang lebih komprehensif terhadap konsep Masyarakat Sejahtera. Islam

⁸ Al-Saïd, şâdiq Mahdi, *al-‘Amal wa al-dhamân al-Ijtimâ’î fi al-Islâm*, Baghdâd: Maṭba’ah al-Ma’ârif, cet. 2, 1971, h. 6. dalam Al- Ibrâhîm *hawâfiż al-‘Amal baina al-Islâm wa al-Naẓariyât al-Wadh’îyyah*, h. 18.

⁹ al-Miṣrî, Abdu al-Samî’, *Muqawwamât al-Iqtisâd al-Islâmi*, Kairo: Maktaba Wahbah, cet. I, 1975, h. 22.

¹⁰ Al-Saïd, *al-‘Amal wa al-dhamân al-Ijtimâ’î fi al-Islâm*, h. 9

memandang manusia secara utuh meliputi aspek, fisik, psikologis dan spiritual; oleh karena itu konsep masyarakat sejahtera adalah pemenuhan terhadap kebutuhan primer untuk menghadirkan kesejahteraan lahir dan batin. Masyarakat sejahtera dalam skala paling minimal, menurut Islam dibingkai dalam lima kemaslahatan pokok (*al-dbarûriyât al-Khamsi*) yang harus terpenuhi, yakni keselamatan pokok agama (rukun Iman dan rukus Islam), jiwa, akal yang sehat, keturunan yang baik dan jaminan keselamatan kepemilikan harta kekayaan. Kelima hal ini disebut dengan *al-Hâjât al-dbarûriyât* (kebutuhan primer). Dengan demikian pembangunan sektor kebutuhan dasar untuk menjamin keselamatan lima hal pokok bagi kemaslahatan manusia tersebut harus menjadi prioritas utama, yang juga mengharuskan pendistribusian dan alokasi sumber dana atau anggaran pembangunan secara proporsional dan memadai untuk produksi kebutuhan dasar dimaksud.

Prioritas pembangunan sektor kebutuhan dasar sebagai suatu perangkat dalam sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan “distribusi” kekayaan negara secara lebih merata. Hal ini tidak mungkin lepas dari faktor “kebijakan” sebagai kewajiban negara dalam melayani masyarakat. Berkenaan dengan hal ini sejalan dengan konsep Negara Kesejahteraan yang pada dasarnya mengacu pada “peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian” di dalamnya “mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya”.¹¹

¹¹ Lihat Triwibowo, Darmawan, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, h. 9

Walaupun terdapat suatu kesamaan dimensi yang dimiliki semua individu, yakni tujuan untuk mewujudkan ‘kesejahteraan’ dalam kehidupan, namun dalam literatur ekonomi, terminologi ‘kesejahteraan’ memiliki banyak pengertian. Dikaitkan dengan ‘keadilan’, maka masyarakat yang adil menurut Ginandjar Kartasasmita: jika interaksi antarwarganya didasari oleh pengenalan bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam segenap aspek kehidupan.¹² Menurut *Al-Ghazālī*: terjadinya saling berinteraksi tersebut dilandasi oleh fondasi ‘iman’ yang berada pada posisi pertama dalam urutan tujuan dan maksud-maksud hukum syari’ah (*maqâsid syari’ah*), yang berfungsi memandu ummat manusia berinteraksi melalui hubungan yang berimbang dan saling menguntungkan untuk mencapai kebahagiaan (*falâh*), kehidupan yang baik (*hayât tayyibah*) yang menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*) dalam suatu komunitas. Ia memasukkan semua perkara yang dianggap penting untuk pemeliharaan lima masalah pokok: keselamatan agama (terkait dengan spiritual, rohani), jiwa, keturunan, akal (tiga masalah terkait dengan kehidupan perekonomian), dan harta kekayaan (sebagai alat)¹³ dalam *maqâsid* utama, semuanya terkait dengan eksistensi kehidupan setiap individu warga masyarakat.

Iman dalam Islam memberikan suatu filter moral bagi alokasi dan distribusi sumberdaya sesuai keadilan sosial-ekonomi, untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan,

¹² Kartasasmita, Ginandjar, *Membangun Masyarakat Indonesia Baru*, makalah pada Seminar Nasional Dies Natalis ke-50 HMI, Jakarta: 29 Januari 1997.

¹³ Al-Ghazālī, dalam Chapra, Muhammad Umer, *al-Islâm wa al-Tabaddî al-Iqtisâdî*, terjemah Muhammad Zuheir al-Samhuri, Ammân: al-Ma’had al-‘âlami, li al-fikr al-Islâmî, 1996, h. 37

distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata¹⁴ dalam mewujudkan masyarakat sejahtera.

Masalah yang berkenaan dengan masyarakat sejahtera muncul, ketika sistem ekonomi kapitalis mendefinisikan “kesejahteraan” sebagai konsep materialis murni, yang menafikan keterkaitan rohani di dalamnya. Demikian juga ekonomi sosialis yang memberikan penekanan pada kesejahteraan material rakyat dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral, yang juga menjadi dasar konsep ‘negara sejahtera’.¹⁵ Sedangkan kenyataannya sebagian masyarakat menginginkan kesejahteraan lahir batin, dengan pengertian bahwa kesejahteraan yang diinginkan tidak menafikan bahkan sebaliknya mengukuhkan adanya keterkaitan dengan aspek rohani. Selanjutnya perbedaan dalam hal konsep tersebut menimbulkan pemahaman berbeda terhadap hakekat kesejahteraan atau masyarakat sejahtera yang dimaksud.

Konsep materialis tersebut didukung oleh tesis Max Weber yang dipublikasikan dalam buku *‘The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism’* menjelaskan ‘Etika Protestan’ dan hubungannya dengan ‘semangat kapitalisme’, bahwa di kalangan Protestan sekte *Calvinis*, kerja keras adalah suatu keharusan bagi setiap manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kerja keras ini merupakan panggilan rohani untuk mencapai kesempurnaan hidup, agar dapat hidup lebih baik secara ekonomi. Dengan

¹⁴ Chapra, M. Umer, *Islam dan tantangan ekonomi*, Jakarta: Gema Insani, 2000, h. 8

¹⁵ Mannân, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, h. 358

bekerja keras serta hidup hemat dan sederhana para pengikut ajaran *Calvin* tidak hanya hidup lebih baik, tetapi mereka mampu pula menfungisikan diri mereka sebagai wiraswastawan tangguh dan menjadikan diri mereka sebagai tulang punggung dari sistem ekonomi kapitalis.¹⁶

Kritik terhadap konsep kesejahteraan dalam sistem kapitalis mengemuka, setelah kenyataan yang membuktikan bahwa kemajuan hidup secara materi, sesuai dengan tujuan ‘kerja’ keras dalam sistem kapitalis adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik secara ekonomi; tapi juga ternyata kondisi baik dalam ‘ekonomi’, tidak menjamin tingginya tingkat kebahagiaan dan tingkat kesejahteraan; terbukti berdasarkan penelitian *Richard Easterlin* yang dilakukan dalam 30 survey di 19 negara maju dan berkembang, disimpulkan bahwa negara-negara kaya tidak lantas lebih bahagia dari negara-negara miskin.¹⁷ Dalam hal ini konsep Islam tentang “kesejahteraan” bukan hanya berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga pada nilai spiritual dan sosial.¹⁸

Berkenaan dengan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan, juga terjadi perdebatan: penelitian awal mengenai kesejahteraan secara sederhana menggunakan indikator output ekonomi per-kapita. Pada perkembangan selanjutnya digantikan dengan pendapatan perkapita, sebagai tanggapan atas kritikan bahwa output ekonomi perkapita dipandang kurang mencerminkan

¹⁶ Mubyarto dkk, *Etos Kerja dan Kobesi Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991, h. 2 dalam Ali, Marpuji, *Etika bisnis dalam Islam, (Kritik Terhadap Kapitalisme)*, 2008 (www.choirulmahfud.blogspot.com)

¹⁷ Bappenas, *Meninjau konsep kesenjangan kesejahteraan*, h. 2

¹⁸ Mannân, *Ekonomi Islam*, h. 358

kesejahteraan masyarakat, tapi lebih mencerminkan nilai tambah produksi yang terjadi pada unit observasi, yaitu negara atau wilayah. Nilai tambah tersebut tidak dengan sendirinya dinikmati seluruhnya oleh masyarakat wilayah yang bersangkutan, sebab sebagian ditransfer ke wilayah pemilik modal yang berbeda dengan wilayah tempat berlangsungnya proses produksi. Sedangkan indikator pendapatan perkapita dipandang lebih mencerminkan apa yang dinikmati oleh masyarakat wilayah. Akan tetapi penggunaan output ekonomi perkapita atau pendapatan perkapita, juga dipandang kurang relevan untuk digunakan dalam mengukur kesejahteraan masyarakat, karena hanya memperhatikan faktor ekonomi. Timbulnya kritik atas hal tersebut, mendorong penggunaan indikator lain yang lebih komprehensif, untuk mengukur perkembangan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan menggunakan indikator pembangunan manusia berkenaan dengan perkembangan konsumsi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat.¹⁹ Berdasarkan hal itu perkembangan kesejahteraan harus dilihat dari sisi pemerataan dalam pembangunan manusia.

Secara teoritik kesenjangan dipengaruhi antara lain oleh faktor struktural (kebijakan) atau dari pihak pemerintah. Sesuai dengan teori-teori mengenai proses kesenjangan pada umumnya yang menekankan antara lain kepada peranan faktor tersebut, disamping itu juga pada faktor lainnya yaitu: faktor alam dan kultural.²⁰

¹⁹ Bappenas, *Meninjau konsep kesenjangan kesejahteraan*, h. 2

²⁰ Bappenas, *Meninjau konsep kesenjangan kesejahteraan*, h. 3

Kesenjangan merupakan kondisi yang bertolak-belakang dengan kesejahteraan. Dimana konsep kesejahteraan minimal adalah terpenuhinya segala hak dasar kebutuhan ekonomi, jika hak atas kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, menjadikan suatu masyarakat berada pada kondisi *pra sejahtera* yang identik dengan *kemiskinan*; dan terjadinya “problema ekonomi” yang juga diartikan berbeda oleh masing-masing sistem ekonomi.

Menurut Islam, masalah distribusi sebagai problema utama ekonomi menurut ekonomi Islam, penanggulangannya dilakukan secara langsung pada sasaran, melalui pemenuhan *hak dasar kebutuhan ekonomi*, dengan memprioritaskan pembangunan sektor produksi kebutuhan dasar tersebut, mengacu pada tujuan utama dari *Maqâsid al-Syarî’ah*, yakni *al-dharûriyât al-kahms*, sebelum penyediaan barang dan jasa kebutuhan pada skala pelengkap dan *tahsîniyah*.

Dalam pemikiran Islam, doktrin *Maqâsid al-Syarî’ah*, sebagaimana dijelaskan *al-Syaṭibi*,²¹ bahwa tujuan akhir dari segala aturan syari’ah adalah *maṣlahat* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Dan yang paling utama dalam *Maqâsid* tersebut adalah lima masalah pada skala *dharûriyah (al-dharûriyât al-kahms)*, yang menjamin keselamatan pokok-pokok agama, jiwa, keturunan, akal dan harta manusia; secara ekonomi, mengutamakan penyediaan segala hak dasar kebutuhan ekonomi untuk pemeliharaan lima masalah tersebut.

Sebagaimana *Al-Ghazâlî*²² dalam mendefinisikan **aspek ekonomi** dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka

²¹ Raisûnî: Ahmad, *Naṣariyat al-Maqâsid ‘inda al-Imâm al-Syaṭibî*, Beirut: al-Ma’had al-‘alami li al-fikri al-Islâmî, 1995, h. 19

²² Raisûnî, *Naṣariyat al-Maqâsid*, h. 145-146

sebuah hirarki utilitas (kesejahteraan) individu dan masyarakat; meliputi kebutuhan pokok (*dharûriyât*); kesenangan atau kenyamanan (*hâjjiyât*); dan kemewahan (*tabîniyât*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar (*dharûriyât*), terletak pada penyediaan kebutuhan ekonomi pada tingkat pertama, sebagai hak dasar akan kebutuhan ekonomi, yaitu kebutuhan pokok akan pangan, pa-kaian dan perumahan; namun demikian kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut cenderung fleksibel. Hak dasar kebutuhan ekonomi, sebagai kebutuhan setiap individu warga masyarakat yang mesti diprioritaskan pemenuhannya; hal tersebut juga merupakan kebutuhan akan barang dan jasa paling besar dari secara kuantitatif, maka untuk itu juga diperlukan produksi yang besar pula; sehingga hal tersebut akan meningkatkan *demand* atas tenaga kerja, yang berarti akan mengurangi pengangguran.

Dalam pencapaian keselamatan dan kesejahteraan hidup, melalui pencapaian maslahat, Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha, tidak mengabaikan kewajiban duniawi. Sesuai dengan pengertian aktifitas atau kerja (*amal*) secara ekonomi menurut Islam, yaitu segala kegiatan yang menghasilkan kontribusi bagi penambahan nilai manfa'at secara global.

PENUTUP

Sesuai fungsi faktor struktural, maka tugas tanggungjawab negara, melalui kebijakan dan strateginya dalam melaksanakan pembangunan, tujuan utamanya adalah memenuhi minimal kebutuhan pokok sisi materi dan rohani, selanjutnya harus fokus pada penanggulangan kesenjangan kesejahteraan, mengatur strategi dalam kegiatan-kegiatan perekonomian, agar tersedia lapangan kerja yang cukup dan memadai bagi semua individu, dengan tidak melakukan diskriminasi antar golongan dan kelompok; untuk itu campur tangan negara dalam sektor perekonomian merupakan keharusan dan menjadi salah satu ciri dari perekonomian. Sistem Islam lebih mengutamakan pemerataan hasil pembangunan daripada pertumbuhan ekonomi semata, karenanya tujuan dari ‘kerja bersama’ dalam proses pembangunan harus dipastikan terlebih dahulu, sehingga dapat memilih opsi-opsi dari strategi pembangunan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Mannân, Muhammad A., *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermedia, 1992.

Muṣṭafâ, Ibrahim wa âkhorûn, *al-Mu'jam al-Wasîf*, Istanbûl: Dâr al-Da'wah, 1989.

Ibn Manzûr, Abû al-Fadhl Jamâluddîn Muḥammad bin Mukram, *Lisân al-'Arab*, Beirût: Dâr al-ṣâdir, 1985.

Halbâwî, Yûsuf wa 'Abd Kharabsyah, *Nabwu Maḥbûm Afdhal li al-Tanmiya al-Hadîṣah*, Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1989.

Al-Qurṭubî, Muhammad bin Ahmad al-Anṣârî, *Al-Jâmi' Li Abkâm al-Qur'ân*, Beirût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyya, 1993.

Majalah al-Iqtisâd wa al-Idârah, Jâmi'ah Malik abd al-'Azîz, vol. 17, Mei 1983.

Al-Saîd, ṣâdiq Mahdi, *al-'Amal wa al-dhamân al-Ijtimâ'i fi al-Islâm*, Baghdâd: Maṭba'ah al-Ma'ârif, cet. 2, 1971.

al-Miṣrî, Abdu al-Samî', *Muqawwamât al-Iqtisâd al-Islâmî*, Kairo: Maktaba Wahbah, cet. I, 1975.

Triwibowo, Darmawan, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.

Kartasmita, Ginandjar, *Membangun Masyarakat Indonesia Baru*, makalah pada Seminar Nasional Dies Natalis ke-50 HMI, Jakarta: 29 Januari 1997.

Chapra, Muhammad Umer, *al-Islâm wa al-Tabaddî al-Iqtisâdî*, terjemah Muhammad Zuheir al-Samhuri, Ammân: al-Ma'had al-'âlamî, li al-fikr al-Islâmî, 1996.

Mubyarto dkk, *Etos Kerja dan Kohesi Sosial*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Raisûnî: Ahmad, *Naṣariyat al-Maqâṣid 'inda al-Imâm al-Syaṭibî*, Beirût: al-Ma'had al-'alami li al-fikri al-Islâmî, 1995.